

# PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TERISOLIR DI JEMBER

## [INSTITUTIONAL ROLE OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN VILLAGE ISOLATED JEMBER]

Syamsul Hadi<sup>1)</sup> dan Arief Noor Akhmadi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Unmuh Jember

<sup>2)</sup> Prodi Biologi FKIP, Universitas Muhammadiyah Jember

Email:abahe\_shk@yahoo.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini meliputi : 1) untuk mengetahui peran kelembagaan lokal secara lebih mendalam terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa terisolir dalam upaya pengentasan kemiskinan; 2) Menganalisa kekuatan internal dan eksternal kelembagaan lokal terhadap upaya menggerakkan perekonomian masyarakat desa terisolir; dan 3) Menemukan strategi peran bagi kelembagaan lokal dalam upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dalam konteks pengentasan kemiskinan di daerah terisolir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survei, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Beberapa kelembagaan lokal yang ada di daerah penelitian belum mampu menunjukkan perannya secara optimal; 2) Kondisi kekuatan internal dan eksternal kelembagaan lokal di daerah penelitian ini menunjukkan Total Nilai Tertimbang untuk faktor Internal (S – W) sebesar 1.29 dan Total Nilai Tertimbang untuk faktor Eksternal (O – T) sebesar 0.64. Posisi kelembagaan berada pada Kwadran I dengan perencanaan strategisnya berorientasi kepada pertumbuhan, dan 3) Strategi peran kelembagaan lokal dalam mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di desa terisolir dapat dibangun dengan memasukkan unsur-unsur kelembagaan lokal yang ada ke dalam model pembangunan secara sistematis dan kohesif.

Keyword : Desa terisolir, Strategi Pertumbuhan, dan Intervensi Kelembagaan Lokal

### ABSTRACT

The purpose of this study include: 1) to determine the role of local institutions in more depth on economic activity in the isolated villages of poverty reduction efforts; 2) Analyze internal and external forces of local institutional move the economy toward community efforts isolated areas; and 3) Finding strategies for the role of local institutions in order to boost economic activity in the context of poverty reduction in isolated villages. The method used is descriptive method with the survey, while data analysis is descriptive and SWOT analysis. The study concluded that 1) Some local institutions in the area of research has not been able to demonstrate its role optimally; 2) The condition of internal and external forces local institutions in the area of this study indicate Total Value Weighted for Internal factors (S - W) at 1:29 and Total Value Weighted for External factors (O - T) of 0.64. Institutional positions are in quadrants I (growth-oriented strategic planning), and 3) Strategies local institutional role in stimulating economic activity in isolated villages can be constructed by incorporating elements of the existing local institutions in the development model of systematic and cohesive.

Keyword: isolated village, Growth Strategies, and Interventions Local Institutional

### PENDAHULUAN

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat pesisir yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan rumah tangganya, sedangkan sebagian lainnya masih berpendapatan rendah. Padahal di sisi lain pemerintah maupun *Non Government Organization (NGO)* telah banyak memberikan intervensi kebijakan dan proses pendampingan terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir, namun hasilnya masih jauh dari harapan dan tujuannya. Aspek-aspek *Local wisdom* dan

sumberdaya lokal belum menjadi faktor yang menarik untuk menjadi bagian dari sistem atau model yang dibangun. *Ego-sektoral* menjadi faktor dominan atas kegagalan dalam melakukan intervensi terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, sehingga menunjukkan sebuah pembangunan yang bersifat hegemonik, parsial dan *non sustainability*.

Konsep paradigma pembangunan holistik adalah sebuah pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memperhatikan aspek spasial, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, berbasis komunitas, berpusat pada rakyat,

berkelanjutan dan berbasis kelembagaan atau dikenal dengan *Resource Base Strategy (RBS)*. Namun sebagian yang lain menganggap bahwa keberadaan kelembagaan lokal kurang berperan dalam pengentasan kemiskinan, padahal kekuatan kelembagaan lokal yang ada di daerah pesisir ini mempunyai peran sangat strategi dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakatnya. Dewasa ini kelembagaan pada tingkat lokal baik yang formal maupun non formal, mengalami tantangan berat di bawah arus modernisasi dengan alih teknologi yang cepat.

Arus modernisasi yang diperkuat oleh kekuatan arus globalisasi yang dasyat, kenyataannya telah mengikis habis berbagai lembaga yang mempunyai fungsi sosial. Masuknya ekonomi uang semakin merangsang hubungan komersial di daerah pedesaan sementara ekonomi dan kelembagaan lokal belum mampu dalam menerima hubungan komersial tersebut. Kelembagaan lokal yang ada pada umumnya tidak mempunyai keterkaitan fungsional satu dengan yang lain. Misalnya lembaga simpan pinjam di tingkat desa yang didukung oleh petani atau nelayan kecil, praktis tidak dapat berkembang karena modal yang dihimpun bersama tidak dapat mencukupi untuk mengikuti hubungan komersial.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di suatu daerah, maka peran kelembagaan lokal tidak bisa diabaikan begitu saja. Tetapi hendaknya dijadikan salah satu pilar utama dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat terutama di daerah terisolir dalam berbagai bentuk fungsional untuk mengarahkan pada pergerakan perubahan kesejahteraan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Menurut Gunawan dan Sugianto (2008) bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan dimaksud perlu diidentifikasi karakteristik potensi yang mereka miliki termasuk eksistensi dan peran kelembagaan lokal.

Berdasarkan fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) untuk mengetahui peran kelembagaan lokal secara lebih mendalam terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa terisolir dalam upaya pengentasan kemiskinan; 2) Menganalisa kekuatan internal dan ekaternal kelembagaan lokal terhadap upaya menggerakkan perekonomian masyarakat desa terisolir; dan 3) Menemukan strategi peran bagi kelembagaan lokal dalam upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dalam konteks pengentasan kemiskinan di daerah terisolir.

## **BAHAN DAN METODE**

### **Jenis, Metode, Waktu dan Lokasi Penelitian**

Jenis kegiatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat (Tekon, 1973). Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, sensus, evaluasi formatif dan summatif (Singarimbun dan Effendi, 1987). Penelitian ini telah dilakukan pada mulan Maret sampai dengan Juni tahun 2014 dan lokasi penelitian

ini dilaksanakan di daerah terisolir, yaitu Desa Curahnongko dan Angdongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember secara *Purposive Sampling*.

### **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari rumah tangga miskin, pelaku ekonomi, dan kelembagaan lokal di daerah penelitian yang dikumpulkan sejumlah kebutuhan dengan cara gabungan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi yaitu meliputi : *Focus Group Discussion, Indepth Interview* dan *observasi*. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari sumber yang terkait dengan penelitian ini sebagai kontrol terhadap data primer.

### **Metode Penentuan Populasi dan Sampel**

Jenis polulasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga macam, yaitu : 1) Rumah tangga yang tergolong warga kurang mampu, 2) pelaku ekonomi dan 3) kelembagaan lokal. Populasi pertama ditentukan sampel sebanyak minimal 10% dari jumlah populasi yang ada secara *snowballing sampling*. Kemudian jenis populasi kedua dan ketiga ditentukan sampel sebanyak minimal 50% dari jumlah populasi yang ada.

### **Analisa Data**

Guna menjawab tujuan pertama digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang telah diinventarisir akan diteliti kelengkapannya, kejelasan tulisan, konsistensi/kesesuaian jawaban dan relevansinya serta lain-lain yang selanjutnya data tersebut disajikan dan diinterpretasikan dalam bentuk Tabel Frekuensi dan atau jenis informasi lainnya (Singarimbun dan Effendi, 1987). Adapun untuk menjawab tujuan kedua tentang analisa kekuatan internal dan ekaternal kelembagaan lokal terhadap upaya menggerakkan perekonomian masyarakat daerah terisolir akan digunakan analisa SWOT. Adapun untuk menjawab tujuan ketiga yaitu untuk menemukan strategi peran bagi kelembagaan local dalam upaya pengentasan kemiskinan terpadu, maka disusun berdasarkan hasil analisa kedua tujuan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kelembagaan Lokal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan di daerah penelitian termasuk program pengentasan kemiskinan mulai PDMDKE, KUT, Raskin, BLT, Jamkesmas, PPIP dan PNPM Mandiri Perkotaan. Program Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun telah didapat termasuk program-program dari pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan (GERHAN), Sosial (PKH), Pertanian (PUAP), PT. Perhutani (PHBM), Tanam Nasional Meru Betiri dan dari departemen lainnya. Namun

secara umum dampaknya terhadap keberdayaan masyarakatnya masih belum nampak signifikan.

Kelembagaan lokal di daerah penelitian memiliki pandangan bahwa secara ekonomi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di lingkungannya memiliki dampak yang cukup baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tabel 3.1 menggambarkan bahwa sebesar 52.44% responden memiliki persepsi bahwa secara ekonomi pelaksanaan program berdampak pada peningkatan ekonomi bagi warga masyarakat, sedangkan 31.71% tidak memiliki dampak apapun. Yang menarik dari hasil penelitian

adalah sebesar 15.85% pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerahnya justru berdampak buruk terhadap menurunnya tingkat perekonomian. Hal ini sebagai akibat pengelolaan program yang kurang baik sehingga berimplikasi pada merosotnya perekonomian secara makro. Program PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan dan PUAP memiliki andil yang cukup baik bagi peningkatan ekonomi masyarakatnya selain program dari Pemprov. Jawa Timur dan Diskop & PKM Kabupaten Jember

Tabel 1. Dampak Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Berdasarkan Pandangan Kelembagaan Lokal Tahun 2014

No	Uraian Dampak Program	Kelembagaan Lokal	
		Jumlah (Org)	Persentase (%)
<b>A. Perekonomian :</b>			
1.	Menurun	13,00	15,85
2	Konstan (Tetap)	26,00	31,71
3	Meningkat	43,00	52,44
Jumlah		82,00	100,00
<b>B. Pendidikan :</b>			
1.	Menurun	10,00	12,20
2	Konstan (Tetap)	28,00	34,15
3	Meningkat	44,00	53,66
Jumlah		82,00	100,00
<b>C Kesehatan :</b>			
1.	Menurun	20,00	24,39
2	Konstan (Tetap)	27,00	32,93
3	Meningkat	35,00	42,68
Jumlah		82,00	100,00

Sumber : Data Primer Diolah

Pada Tabel 1 di atas dapat diungkapkan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah penelitian terutama PNPM Mandiri Perkotaan yang notabene memiliki kekuatan unsur pembelajaran yang luar biasa, faktanya kurang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan bagi warga masyarakat. Dalam studi investasi sumber daya manusia dikatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan. Kesehatan dan pendidikan bukan merupakan sekedar input fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental. Padahal menurut pendapat Widodo dan Suradi (2007) dapat dijelaskan bahwa keberadaan kelembagaan yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal, telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Setiawan (2010) bahwa program pengentasan kemiskinan pada dasarnya sudah direalisasikan oleh pemerintah hanya saja kenyataan di lapangan sering terjadi ketidaktepatan sasaran menjadi

salah satu faktor penghambat penanggulangan kemiskinan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kelembagaan lokal yang ada di daerah penelitian seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelembagaan ekonomi (koperasi dan UKM yang mereka bentuk selama ini) belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti yang diharapkan terutama terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Padahal sejatinya, kelembagaan lokal menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal terutama menyangkut permasalahan ekonomi. Bahkan pada batas-batas tertentu, masyarakat tidak akan mendukung kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah, sehingga dalam konstelasi persoalan ini, kelembagaan lokal berperan sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah lokal.

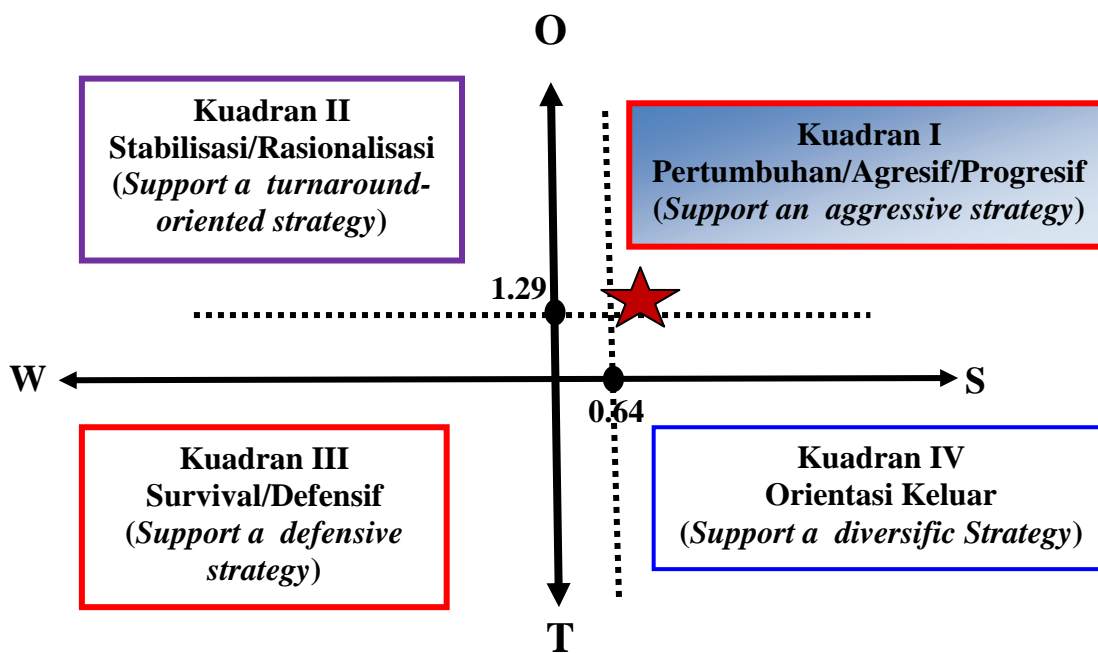
Hal ini terjadi karena adanya hambatan yang bersifat internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap terciptanya peluang sinergis antara keterlibatan kelembagaan local secara langsung dalam

mekanisme pelaksanaan program dimaksud. Diantara hambatan tersebut adalah pemahaman pelaku program terhadap substansi dan filosofi program belum dapat diartikulasikan dengan tepat. Sehingga keberadaan kelembagaan lokal yang sudah ada diasumsikan sebagai kompetitor bagi upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Oleh karena itu, menurut pandangan Situmorang (2008) bahwa peran kelembagaan lokal menjadi sangat penting guna mendorong terhadap akselerasi aktivitas perekonomian. Kelembagaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal. Terlebih di daerah penelitian yang tergolong daerah terisolir ini, partisipasi kelembagaan lokal pada program pengentasan kemiskinan menjadi amat penting dan urgent.

#### **Analisa Kekuatan Internal dan Eksternal Kelembagaan Lokal**

Guna menjawab tujuan kedua yaitu untuk menyusun model pengentasan kemiskinan terpadu di daerah penelitian adalah didasari hasil analisis lingkungan SWOT terhadap kondisi internal dan eksternal kelembagaan lokal yang ada. Analisis SWOT

yang dimaksud adalah metode perencanaan strategis yang membahas mengenai cara melakukan evaluasi dengan menggunakan analisis *Strengths, Weakness, Opportunities* dan *Threats* (Rangkuti, 2004). Hasil analisis SWOT terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal kelembagaan di daerah penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan posisi dan strategi perencanaan intervensi kelembagaan lokal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di masa akan datang. Adapun Total Nilai Tertimbang (TNT) dari hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut : Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk faktor Internal (S – W) sebesar 1.29 dan Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk faktor Eksternal (O – T) sebesar 0.64. Posisi kelembagaan lokal di daerah pesisir desa terisolir di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ditentukan berdasarkan hasil perhitungan selisih nilai kekuatan dan nilai kelemahan, dan selisih nilai peluang dan nilai ancaman yang menempatkan posisinya pada Kwadran I sebagaimana pada Gambar 1, dimana kondisi lingkungan internal bernilai positif dan lingkungan eksternal bernilai positif. Pada posisi seperti itu perencanaan strategisnya sebaiknya berorientasi kepada pertumbuhan atau pengembangan (*Support an aggressive strategy*)



Gambar 1. Hasil Analisis Lingkungan SWOT terhadap Kelembagaan Lokal di Kecamatan tempurejo Kabupaten Jember (Data Primer Diolah, 2014)

Kuadran I menggambarkan situasi bahwa posisi ini menandakan sebuah kelembagaan lokal yang kuat dan berpotensi untuk ditumbuhkembangkan. Artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa situasi yang sangat baik karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang konstruktif untuk dapat melakukan intervensi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir desa terisolir. Strategi Integrasi vertikal antar semua komponen yang ada menjadi pilihan utama dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan melalui strategi S - O dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) yang dimiliki secara optimal untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada dengan seluas-luasnya. Hal ini sesuai dengan Rangkuti (2004) yang berpendapat bahwa posisi organisasi pada Kuadran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

Pada Tabel 2 disajikan rumusan kombinasi strategik bagi peran kelembagaan lokal dalam mengintervensi keberdayaan ekonomi atas kekuatan internal yang dimiliki di daerah penelitian antara lain permodalan relatif kuat, kebersamaan dan kegotongroyongan, kekompakan diantara anggota, iktikad dan niat yang kuat dalam memajukan perekonomian masyarakat, kedisiplinan, kapasitas SDM cukup berkualitas, dapat menampung hasil-hasil produksi pertanian, menjadi distribusi dan apresiasi warga terhadap kelembagaan lokal cukup tinggi. Sementara itu, peluang yang ada di daerah penelitian antara lain banyaknya program pembangunan yang dapat disnergiskan, adanya program pembinaan dari pemerintah, besarnya minat masyarakat untuk bergabung dengan kelembagaan lokal, terdapat perusahaan nasional dan swasta yang memiliki program CSR (*Corporate Social Responsibility*), adanya obyek wisata yang masih belum dikembangkan, pengembangan transportasi Jalur Lintas Selatan (JLS) yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kasawan, budaya kearifan lokal tentang munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.

Tabel 2. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT bagi Kelembagaan Lokal dalam melakukan Intervensi Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Pesisir Desa Terisolir di Kecamatan Tempurejo Tahun 2014

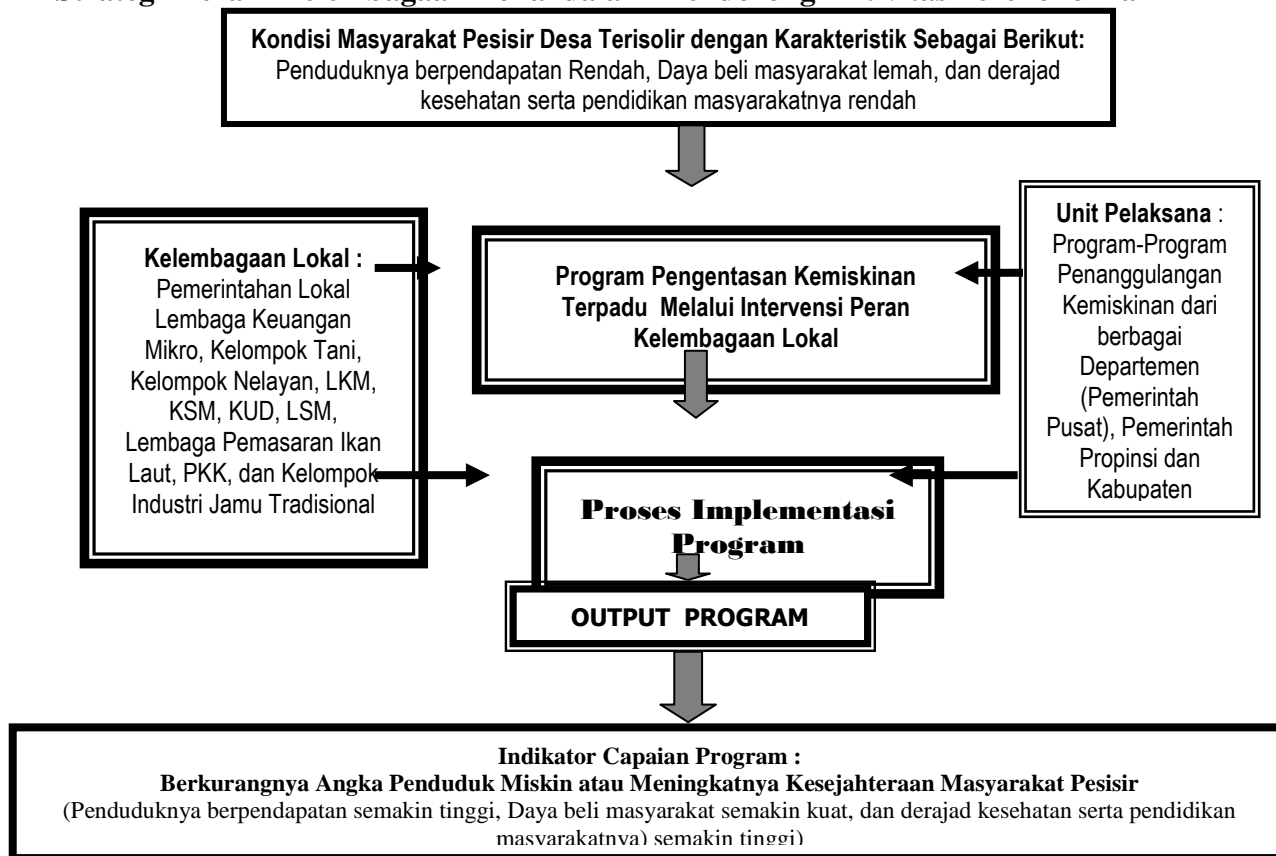
<table border="1"> <tr> <td><b>I FAS</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>EFAS</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>I FAS</b>			<b>EFAS</b>			<i>STRENGTH (S)</i>	<i>WEAKNESS (W)</i>
	<b>I FAS</b>							
<b>EFAS</b>								
<i>OPPORTUNITY (O)</i>	<b>Strategi S - O</b>	<b>Strategi W - O</b>						
	Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (3,41)	Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan opportunity (2,12)						
<i>THREAT (T)</i>	<b>Strategi S - T</b>	<b>Strategi W - T</b>						
	Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (2,77)	Meminimalkan kelemahan menghindari ancaman (1,48)						

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas maka semakin memperjelas bahwa strategi S – O menjadi pilihan perencanaan strategi yang utama karena memiliki nilai skor tertinggi yaitu 3.41 dibandingkan dengan 3 strategi lainnya. Pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan lokal dalam mendorong terhadap upaya mendorong aktivitas ekonomi di daerah penelitian melalui berbagai kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang

yang ada. Integrasi vertikal antar semua kelembagaan lokal yang ada perlu segera dibangun untuk memperoleh model pemberdayaan masyarakat yang aplikatif, efektif dan efisien. Pelibatan, prakarsa, dan partisipasi kelembagaan lokal termasuk warga masyarakat sasaran menjadi kata kunci bagi keberhasilan sebuah program pembangunan yang dijalankan.

### Strategi Peran Kelembagaan Lokal dalam Mendorong Aktivitas Perekonomian



Gambar 2. Skema Model Strategi Peran Kelembagaan Lokal dalam Upaya Mendorong Aktivitas Perekonomian di Desa Terisolir

## KESIMPULAN

1. Beberapa kelembagaan lokal yang ada di daerah penelitian seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelembagaan ekonomi belum mampu menunjukkan perannya secara optimal akibat adanya hambatan untuk membangun sinergis antara program-program yang ada dengan pelibatan kelembagaan lokal.
2. Hasil analisis SWOT terhadap kondisi kekuatan internal dan eksternal kelembagaan lokal di daerah penelitian ini menunjukkan Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk faktor Internal (S – W) sebesar 1.29 dan Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk faktor Eksternal (O – T) sebesar 0.64. Posisi kelembagaan lokal di daerah terisolir di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember berada pada Kwadran I dengan perencanaan strategisnya berorientasi Pertumbuhan atau pengembangan. Oleh karena itu, strategi S – O menjadi pilihan perencanaan strategi yang utama karena memiliki nilai skor tertinggi yaitu 3.41 dibandingkan dengan 3 strategi lainnya.
3. Strategi peran kelembagaan lokal dalam mendorong aktivitas perekonomian di desa terisolir dapat dibangun dengan memasukkan unsur-unsur kelembagaan lokal yang ada ke dalam model pembangunan secara sistematis dan kohesif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada DP2M – DIKTI DEPDIKBUD RI yang telah memberikan dana hibah penelitian sehingga Publikasi ilmiah ini dapat diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan dan Sugiyanto, 2008. Kondisi Keluarga Fakir Miskin. Jurnal Litbang Depsos RI. Jakarta.
- Rangkuti, F., 2004. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Setiawan, D., 2010. Kemiskinan: Latar Belakang, Dampak dan Pemecahan. *www.dase.setiawan. "Knowing is nothing, applying is everything"*.
- Singarimbun dan Effendi, S., 1987. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
- Situmorang, 2008. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bina Rena Pariwara. Jakarta. Cet.2.
- Teken, 1973. Metode Penelitian Di Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Widodo, N., dan Suradi, 2007. Penelitian Peranan Kelembagaan Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat. *Dalam Jurnal Depsos RI. Vol. 25 No. 5 Tahun 2007.*